

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2020)

Oleh :

Atwal Arifin,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email :

Sinta Nur Azizah,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : b200180331@student.ums.ac.id

Article Info

Article History :

Received 10 April - 2022

Accepted 24 April - 2022

Available Online

30 April - 2022

Abstract

This study has a purpose, namely to determine the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on the Human Development Index with Capital Expenditure as an Intervening Variable. The population in this study is DAU, DAK, DBH, Capital Expenditure, and HDI in the Regency/City of Central Java Province in 2017-2020. The samples used in this study were 124 samples. The method of sample collection using purposive sampling technique. The statistical method uses multiple linear regression analysis model. The results of this study indicate that DAK has an effect on HDI, while DAU and DBH have no effect on HDI. Furthermore, DAU has an effect on HDI through Capital Expenditures, while DAK and DBH have no effect on HDI through Capital Expenditures.

Keyword :

General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing, Fund (DBH), Human Development Index (IPM), Capital Expenditure (BM)

1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Adanya data IPM yang terpublikasi berguna sebagai alat perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM harus ditingkatkan, sehingga meningkatkan daya saing yang tinggi, dengan ditandainya dalam Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat dari setiap tahunnya (UU No. 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai adanya pembangunan yang merata.

Pembangunan dapat berupa infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, dan sarana transportasi yang akan memberikan dampak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk kesejahteraan sehingga jika diukur dengan IPM maka akan meningkat.

Tentunya dalam pembangunan memerlukan biaya, sehingga dalam hal ini pemerintah juga perlu mendukung adanya biaya yang disalurkan yaitu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk meningkatkan Belanja Modal (BM) yang memiliki pengaruh penting untuk meningkatkan IPM.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah IPM. Sedangkan variabel independennya yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH. Variabel BM merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Rizki (2021). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen ada penggantian menjadi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Serta lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada penelitian ini terdapat dua teori yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori *Peacock-Wiseman*.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Keterlibatan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyeluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Siswandi dkk, 2015).

Teori *Peacock-Wiseman*

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman berdasarkan analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berusaha memperbesar pengeluaran dengan memperbesar penerimaan dari pajak, sedangkan masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Meningkatnya pembayaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Priambodo, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun tidak langsung. Kemandirian suatu daerah ditunjukkan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Apabila semakin sedikit DAU yang diperoleh daerah maka dapat disimpulkan bahwa

ketergantungan masyarakat dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan. Puji L., Sudati N. S., Panji K. P. (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016.

H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Dana Alokasi Khusus sangat penting dalam pembangunan daerah karena berdampak pada pembangunan nasional. DAK bersumber dari APBN yang digunakan untuk mendanai pelayanan publik yang bersifat khusus.

Pada penelitian lainnya yaitu Dara Estu S. (2019) juga menunjukkan DAK berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :

H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, DBH merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan dimana dalam pengalokasiannya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dana Bagi Hasil seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung, yang artinya belanja yang berhubungan dengan masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova Yurista Santi (2019) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, sudah sewajarnya menjadi konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Setyowati dan Suparwati (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa DAU

terbukti berpengaruh positif pada IPM melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : DAU berpengaruh terhadap IPM dengan BM sebagai variabel intervening

Penggunaan DAK pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah daerah karena bagian dari APBN. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kegunaan dana alokasi khusus sebenarnya hanya sebagai penambahan atau pelengkap jenis dana perimbangan lainnya. Namun, seiring perkembangannya kebedadaan dana alokasi khusus menjadi semakin penting guna pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian Anny Widiasmara (2019) menjelaskan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H5 : DAK berpengaruh terhadap IPM dengan BM sebagai variabel intervening

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari APBN dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Siswandi, dkk. (2015), menyatakan bahwa sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditunjukkan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan untuk penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi tersebut melalui belanja modal.

Siswandi, dkk (2015) menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah :

H6 : DBH berpengaruh terhadap IPM dengan BM sebagai variabel intervening

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hubungan variabel yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2020 (<https://jateng-ppid.bpk.go.id>) dan Badan Pusat Statistik selama tahun 2017-2020 (www.bps.go.id).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020. Populasi ini terdiri dari 29 daerah Kabupaten dan 6 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 35 data. Penentuan

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling method. Purposive sampling adalah sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berurutan-turut tahun 2017-2020.
- 2) Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten tahun 2017-2020.
- 3) Memiliki data yang relevan dan lengkap terkait dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja daerah.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model pengujian regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 25. Dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. (Nugroho, Sigit. 2008. Statistika Multivariat Terapan).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah sampel awal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020	140
Yang tidak menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berurutan-turut pada tahun 2017-2020	(0)
Yang tidak menerbitkan data IPM yang lengkap pada tahun 2017-2020	(0)
Yang tidak memiliki data yang relevan dan lengkap terkait dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja daerah	(0)
Jumlah outlier	(16)
Tahun Pengamatan	4
Jumlah sampel akhir dalam penelitian	124

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh sampel secara keseluruhan sebanyak 124 sampel dalam 4 tahun, namun setelah proses regresi terdapat beberapa data yang memiliki nilai ekstrim atau outlier yaitu sebanyak 16 data outlier sehingga harus dikeluarkan dan sampel akhir yang diperoleh sebanyak 124 sampel.

Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini menyatakan bahwa uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov* untuk membuktikan bahwa data berdistribusi normal, uji multikolinieritas untuk membuktikan ada tidaknya korelasi antar

variabel independen, uji autokorelasi menggunakan *Runs-test* untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, uji heteroskedastisitas menggunakan *Rank Spearman* untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu dengan yang lain atau tidak, uji F untuk mengetahui kesesuaian antara model penelitian dengan penelitian, uji R² untuk mengukur proporsi dari seluruh variabel bebas dan variabel intervening, dan uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen.

Tabel 2. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

	Persamaan 1			Persamaan 2		
	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Sig.	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	Sig.
Konstanta	37788927762,136		0,748	136,269		0,000
DAU	0,062	0,563	0,000	0,000	-0,263	0,079
DAK	0,149	0,065	0,588	0,000	-0,286	0,039
DBH	0,305	0,170	0,017	0,000	-0,047	0,563
BM				0,000	0,049	0,623

Hasil analisis jalur diatas berikut penjelasannya, nilai pengaruh langsung Dana Alokasi Umum adalah sebesar -0,263, sedangkan pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia harus dihitung dengan cara mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0,563x0,049) = 0,027587. Maka pengaruh total yang diberikan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung ((-0,263)+0,027587) = -0,235413.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dimediasi oleh Belanja Modal.

Nilai pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus pada Indeks Pembangunan Manusia adalah -0,286, sedangkan pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia harus dihitung dengan cara mengalikan koefisien tidak langsungnya (0,045x0,049) =

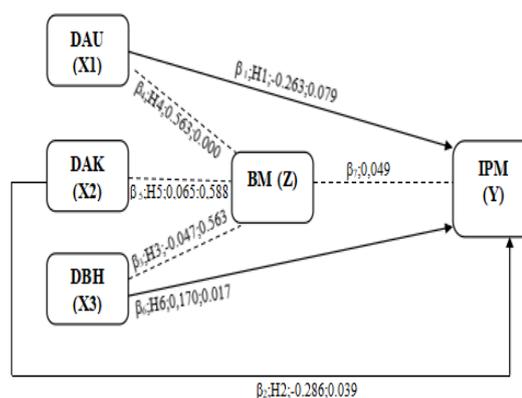
0,002205. Maka pengaruh total yang diberikan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung ((-0,286)+0,002205) = -0,283795.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dimediasi oleh Belanja Modal.

Nilai pengaruh langsung Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia adalah -0,047, sedangkan pengaruh tidak langsung Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia harus dihitung dengan cara mengalikan koefisien tidak langsungnya (0,170x0,049) = 0,00833. Maka pengaruh total yang diberikan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung ((-0,047)+ 0,00833) = -0,03867.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, berarti Dana Bagi Hasil secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dimediasi oleh Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hasil model penelitian ini sebagai berikut:



Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Hasil uji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf signifikansi 0,079. Nilai signifikansi 0,079 lebih besar dari signifikansi 0,05 sehingga **H1 ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa H1 menyatakan Dana Alokasi Umum tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansyah dan Widyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap IPM. Tidak adanya pengaruh DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas perekonomian daerah tersebut. Selain itu, DAU sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Ini bisa dilihat dari formulasi DAU yang memasukkan komponen alokasi dasar sebagai komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Hasil uji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf signifikansi 0,039. Nilai signifikansi 0,039 lebih kecil dari signifikansi 0,05 sehingga **H2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa H2 menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara Estu S. (2019) menunjukkan DAK berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka penggunaan DAK sebagai dana infrastruktur untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan 12 prasarana fisik dilakukan pemerintah daerah dengan baik dan sesuai dengan prioritas. Sehingga kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Hasil uji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh taraf signifikansi 0,563. Nilai signifikansi 0,563 lebih besar dari signifikansi 0,05 sehingga **H3 ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa H3 menyatakan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu komponen dari Dana

Perimbangan, DBH yang bersumber dari APBN dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditunjukkan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi tersebut. Oleh karena itu DBH tidak memiliki pengaruh terhadap IPM karena DBH digunakan untuk membiaya objek tertentu yang menghasilkan bagi daerah bukan pada infrastruktur umum.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Hasil uji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan diintervening oleh Belanja Modal diperoleh taraf signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Sedangkan nilai pengaruh langsung -0,263 dan pengaruh tidak langsung 0,027587. Dengan membandingkan nilai beta pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, **H4 diterima** artinya DAU berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Nindhita (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap IPM melalui BM. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana hibah yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima. Dana yang didapat pemerintah daerah dari DAU akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, melengkapi serta memperbaiki sarana dan prasarana daerah. Sehingga besar kecilnya DAU mempengaruhi seberapa banyak perbaikan serta pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Hasil uji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan diintervening oleh Belanja Modal diperoleh taraf signifikansi 0,588. Nilai signifikansi 0,588 lebih besar dari signifikansi 0,05. Sedangkan nilai pengaruh langsung 0,065 dan pengaruh tidak langsung 0,002205. Dengan membandingkan nilai beta pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, **H5 ditolak** artinya DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nindhita Maharditya (2018) yang menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui BM. Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, pemerintah pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Dalam penelitian ini DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui BM dapat diasumsikan bahwa DAK yang tinggi belum tentu diikuti IPM yang meningkat melalui BM yang mningkat pula. Hal ini dikarenakan penyaluran DAK tidak dialokasikan untuk belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan IPM, melainkan untuk belanja operasional lainnya

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Hasil uji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan diintervening oleh Belanja Modal diperoleh tarif signifikansi 0,017. Nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Sedangkan nilai pengaruh langsung 0,170 dan pengaruh tidak langsung 0,00833. Dengan membandingkan nilai beta pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dengan demikian, **H6 ditolak** artinya DBH tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiliantara dan Budiasih (2016) bahwa kemampuan dana bagi hasil dalam membiayai belanja modal tidak mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dikarenakan prosentase pengalokasian dana bagi hasil daerah kurang berkontribusi dalam menunjang belanja modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana umum maupun menanggulangi ketimpangan fiskal yang berdampak pada belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga **H1 ditolak**.
- 2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga **H2 diterima**.

- 3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga **H3 ditolak**.
- 4) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening Belanja Modal, sehingga **H4 diterima**.
- 5) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening Belanja Modal, sehingga **H5 ditolak**.
- 6) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang diintervening Belanja Modal, sehingga **H6 ditolak**.

6. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (www.bps.go.id.)
- Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (<https://jateng-ppid.bpk.go.id>)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang RPJPN.
- Maharditya, Nindhita., 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. www.eprint.ums.ac.id.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih., 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Dara Estu S., 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi.(Skripsi). www.eprint.ums.ac.id.
- Anny Widiasmara., 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Journal of Islamic Finance and Accounting Vol. 2 No. 1. P-ISSN:2615-1774. E-ISSN:2615-1782.
- Puji L., Sudati N.S., Panji K.P., 2019, Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. DINAMIC:Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 1.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati., 2012, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD pada Indeks Pembangunan

Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah . Prestasi, 9(1), Juni 2012.

Siswadi, dkk., 2015, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. *Assets*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015 : 1-12.

Priambodo, Anugrah., 2015, Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Williantara, G. F., & Budiasih, I. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 2044-2070.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sugiyono., (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Nugroho, Sigit., 2008, *Statistika Multivariat Terapan*. ISBN : 978-979-9431-36-3